

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abdurrahman, 1984, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-hambatannya dalam praktek di Medan*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1989, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Cet. VII, Alumni, Bandung.
- H.S, Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hartanto, J. Andy, 2009, *Problematisa Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Koesoemawati, Ira dan Yuniman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Lubis, Muhammad Yamin, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muliawan, Jarot Widya, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Mustafa, Bachsan 1998, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remaja Karya, Bandung.
- Nasution, S, 2003, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P. 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Perangin, Effendi, 1989, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 1994, *Praktek Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Salindeho, John, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salle, Aminuddin, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Total Media, Jakarta
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- , 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Soemitro, Rony Hanityo, 1998, *Metode Penelitian Hukum Dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudjito, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan Tanah, Perolehan, Pelepasan, dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, Yakarisma, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta.
- , 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, 1995, *Surat Berharga ; Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Syah, Mudakir Iskandar, 2007, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan umum Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*, JalaPermata, Jakarta.

Syahrani, Riduan 1989, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.

Usman, Rachmadi, 2001, *Dimensi Hukum Surat Berharga : Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Djambatan, Jakarta.

Widya Muliawan, Jarot, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Buku Litera, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

Tim kerja, *Analisa dan Evaluasi Hukum Masalah Calo Dalam Jual Beli Tanah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992.

Maria S.W Sumardjono, *Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, *Majalah Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.

Martanto, Fakhrudin dan Saut Aritua H. Sagala, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persoalan Relokasi Pasca Bencana Lahar hujan di Kali Putih”, *Jurnal Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan*, Institut Teknologi Bandung, Vol. 5, April 2011.

Prameswari, Dwi, “Erupsi Merapi, Dua Tahun dan Tugas (Belum) Usai”, *Jurnal*, Faculty of Social & Political Science Universitas Gadjah Mada, Vol. 11, Oktober 2012.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak), Oktober 2012.

C. Tesis

Rusmiyati, “Kedudukan Asas Itikad Baik Dalam Pengertian Objektif (Kepatutan) Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Akta Kuasa Menjual Tanah (Studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Register Perkara Nomor 01/Pdt.G/PN.Slmn)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.

Sugi Endro Amiarso, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa di Wilayah Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Theedens, Irenne Yovita, “Pelaksanaan Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Yogyakarta”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 No. 66 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia(TNLRI) No.4723.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1997 No. 59 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia(TNLRI) No.3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 No. 52 dan penjelasan

dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TNLRI) No.3746.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 42 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia(TNLRI) No.4828

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor.120 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia(TNLRI) No.5893.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaa Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2012 Nomor 156

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 366

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan asset desa

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

E. Internet

<http://www.rekompakciptakarya.org/news/2014/09/sertifikat-hak-milik-diserahkan-warga-huntap-larangan-sumringah/>

<http://www.etd.ugm.ac.id/S2-2014-238928>

http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/05/2011-0429_KRB_Area_Terdampak_Merapi.